



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG Sarana dan Prasarana, dan Sistem
KOMUNIKASI Pencarian dan Pertolongan

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AWANG KURNIAWAN**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NIK : **836168**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 452 m²/205 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.509.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 492.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. MOBIL, LAND ROVER CANVAS SHORT 88 Tahun 1960, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, TOYOTA BJ 40 RV Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
6. MOBIL, LAND ROVER 109 LONG CHASSIS Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. MOTOR, HONDA CB 150 STREETFIRE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
8. MOTOR, HONDA CB VERZA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
9. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



22.000.000

10. MOBIL, TOYOTA FJ 40 RV Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp.

60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 70.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 83.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.862.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.862.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.